

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

Fajar Santoso Pulungan, Murni Daulay dan Hasan Sakti Siregar

Universitas Sumatera Utara

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

fajarsantosopulungan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), ID (ID) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini adalah asosiatif kausal. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Metode analisis data melalui regresi linear berganda dan uji residual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAK dan ID berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil pengujian residual menunjukkan bahwa belanja daerah terbukti sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan ID terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi.

Pendahuluan

Latar Belakang Pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya undang-undang tersebut diperbaharui dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan diterbitkannya UU ini pemda secara otomatis memiliki kewenangan yang lebih luas. Adanya perimbangan kewenangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut menyebabkan masing-masing pemda harus memiliki sumber pendanaan yang memadai sehingga dapat menjalankan roda pemerintahan secara mandiri. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemda dikarenakan pemda memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemda mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 tahun 2004). Inti hakekat otonomi adalah adanya kewenangan daerah, bukan pendelegasian (Saragih, 2005).

Menghadapi kondisi otonomi daerah ini, pemerintah kabupaten/kota harus memiliki kesiapan dan kemantapan sumber pendanaan bagi pembiayaan pembangunan yang sangat mutlak diperlukan dalam mewujudkan pemda yang mandiri dari ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi (Nugraeni, 2011).

Adapun tujuan utama otonomi daerah, adalah menciptakan kemandirian pemda sehingga masing-masing pemda harus mengoptimalkan penerimaan daerah dengan memberi perhatian lebih

kepada penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil laba usaha daerah dan PAD lainnya yang sah. Komponen PAD ini dapat dimanfaatkan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah, selain itu perkembangan penerimaan PAD menunjukkan upaya yang telah dilakukan pemda dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara periode 2011-2014, secara umum peranan PAD terhadap APBD dirasakan masih rendah. PAD yang rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Untuk itu diperlukan usaha dari pemda yang lebih keras dalam rangka menciptakan kemandirian daerah, terutama dari sisi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dirasakan masih kurang. Dalam rangka menciptakan kemandirian daerah tersebut, pemda harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai

sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber PAD. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal yang rendah (Halim, 2001). Daerah dengan kapasitas fiskal yang masih rendah, cenderung mengalami tekanan fiskal yang kuat. Oleh karenanya pemda dituntut untuk dapat mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki, dimana salah satunya dengan memberikan porsi belanja daerah pada sektor produktif.

Keberadaan otonomi daerah ini berarti pemda dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam hal *financial*. Meski begitu pemerintah pusat tetap memberi dana bantuan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditransfer ke pemda. Ketiga bentuk dana bantuan ini disebut juga dana perimbangan. Adapun tujuan pemberian dana perimbangan adalah untuk mengurangi adanya kesenjangan fiskal antar daerah, selain itu dana perimbangan ini digunakan untuk

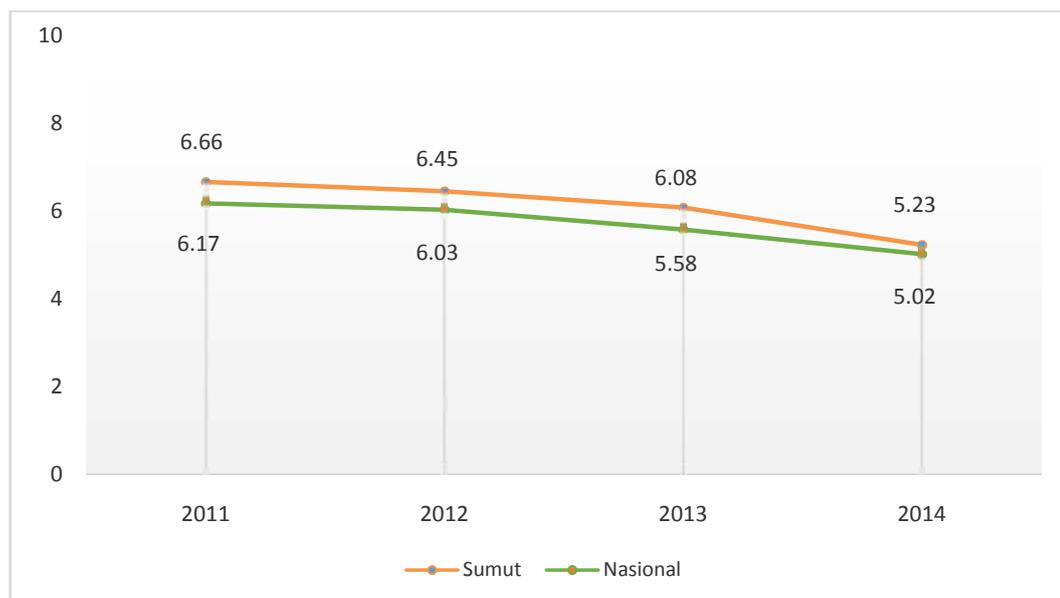
membantu pemda dalam hal membiayai kegiatan pemerintahan.

DBH merupakan salah satu bentuk dari dana perimbangan, merupakan sumber pendanaan terbesar di kabupaten/kota Sumatera Utara bila dibandingkan dengan DAU dan DAK. Semakin besar pendapatan pajak maupun sumber daya alam dari suatu daerah, maka DBH yang diperoleh daerah tersebut semakin besar. Semakin besar penduduk suatu daerah atau semakin luas wilayah suatu daerah maka semakin besar pula DAU yang diperoleh oleh daerah tersebut.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan

antar daerah melalui penerapan formula tertentu seperti besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) dan potensi fiskal daerah (*fiscal capacity*). DAK bertujuan untuk membantu kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, biasanya DAK untuk membiayai penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat yang belum mencapai standard tertentu atau DAK digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Gambar 1.1 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara Dan Nasional Tahun 2011-2014

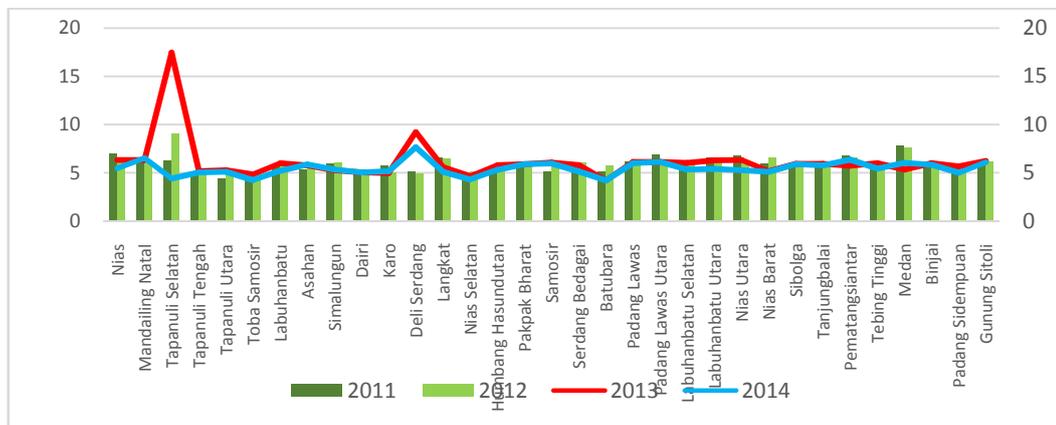


Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan (2016)

Dari Gambar 1.1 dapat dilihat pada tahun 2011-2014 persentase pertumbuhan ekonomi nasional (Indonesia) memiliki tren menurun. Terjadi perlambatan persentase pertumbuhan ekonomi. Persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara memiliki pola yang sama dengan persentase pertumbuhan

ekonomi nasional yaitu memiliki tren menurun. Akan tetapi persentase pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara masih berada di atas persentase pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga pembahasan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara khususnya kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara merupakan hal yang menarik.

Gambar 1.2 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011-2014



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan (2016)

Dari Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa sepanjang tahun 2011-2014, jika dilihat secara khusus persentase pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Sumatera Utara bergerak fluktuatif. Terkadang persentase pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tinggi dan terkadang persentase pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi tergantung

kepada seberapa maju kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu daerah. Maju tidaknya kegiatan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh sumber pendanaan yang tersedia untuk melakukan kegiatan ekonomi tersebut.

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Ketidakkonsistenan ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009). Penelitian ini meneliti tentang pengaruh PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara PAD dan Belanja Pembangunan terhadap Kemandirian daerah, namun PAD dan Belanja Pembangunan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun hasil penelitian Fitriyanti dan Pratolo (2009) ini memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2009). Penelitian yang dilakukan oleh Sitepu (2009) menguji pengaruh PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening, koefisien jalur PAD dan DAU signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara koefisien jalur Belanja Modal tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Rumusan Masalah Penelitian

- a. apakah PAD, DAU, DAK, DBH dan ID berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara baik secara simultan dan parsial?
- b. apakah Belanja Daerah dapat memoderasi hubungan PAD, DAU, DAK, DBH dan ID terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian

- a. untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, DAU, DAK, DBH dan ID terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara baik secara simultan dan parsial,
- b. untuk mengetahui dan menganalisis Belanja Daerah dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU, DAK, DBH dan ID terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari peneliti terdahulu, yaitu Sitepu di Provinsi Sumatera Utara

pada tahun 2009 yang berjudul "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu:

1. variabel independen dalam penelitian terdahulu adalah PAD dan DAU. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID.
2. penelitian terdahulu menggunakan Belanja Modal sebagai variabel intervening, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan Belanja Daerah sebagai variabel moderating.
3. penelitian terdahulu menggunakan alat uji Analisis Jalur (*Path Analysis*), sedangkan penelitian ini menggunakan alat uji Analisis Regresi Berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan Uji Residual.
4. penelitian terdahulu menggunakan tahun amatan 2004-2007, sedangkan penelitian ini

menggunakan tahun amatan 2011-2014.

5. penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 20 sampel, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 33 sampel.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Bastian (2006), Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), PAD adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan yang dilakukan oleh pemdaberdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. PAD adalah sumber pendapatan daerah yang murni digali oleh daerah, dan oleh karena itu daerah memiliki kewenangan penuh dalam

memanfaatkan PAD untuk kepentingan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah.

Sesuai dengan UU nomor 33 Tahun 2004 bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan kata lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan fiskal lebih besar dari potensi penerimaan daerah. Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut distribusi DAU kepada daerah yang memiliki *fiscal capacity* relatif besar akan menerima DAU lebih kecil dan sebaliknya daerah yang memiliki *fiscal capacity* yang relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif lebih besar. Dengan konsep ini sebenarnya

daerah dengan *fiscal capacity* lebih besar dari *fiscal needs* nya, perhitungan DAU nya akan negatif. Untuk menghindari adanya kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan faktor penyeimbang. Dengan adanya faktor penyeimbang ini, alokasi DAU kepada daerah ditentukan dengan perhitungan formula *fiscal gap* dan faktor penyeimbang.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan bahwa Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas ke pemerintahan dibidang tertentu khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Secara umum DBH terdiri atas DBH Perpajakan dan DBH Sumber Daya Alam (Wahyuni dan Adi 2009).

Investasi Daerah (ID)

Secara umum investasi adalah meliputi penambahan barang dan jasa dalam masyarakat. ID merupakan penanaman modal yang dananya berasal dari daerah itu sendiri.

Menurut Wiranata (2004), investasi terdiri atas: (1) Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri. (2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri. Modal dari dalam negeri ini bisa didapat dari pihak swasta ataupun dari pemerintah. Tetapi dalam penelitian ini subyek yang akan dibahas hanya PMDN yang berasal dari pemerintah yaitu Pemda

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemda yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Menurut Djojohadikusumo (1994), pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Simanjuntak (2006) menganalisis hubungan antara pengaruh PAD terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Labuhan Batu.

Hamzah (2009), menganalisis hubungan antara pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur (Studi pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2001-2006). Kesimpulan pada penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Publik, PAD dan Dana Perimbangan secara langsung dan tidak langsung melalui Belanja Publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Publik secara langsung tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan secara tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan dan Pengangguran, dan Pertumbuhan

Ekonomi secara langsung berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pengangguran.

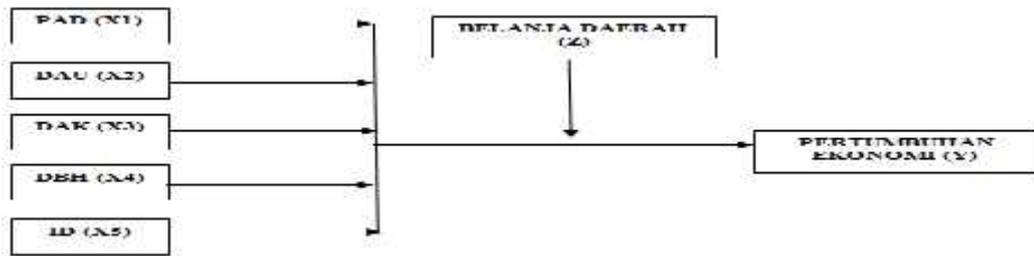
Sitepu (2009), menganalisis hubungan antara PAD, DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, PAD dan DAU secara langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, sementara Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Erlina, Torong dan Malau (2013), menganalisis hubungan antara PAD, DAU dan DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian ini adalah secara simultan dan parsial PAD, DAU berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Variabel Belanja Modal bukan

merupakan Variabel Moderating yang mempengaruhi hubungan Kerangka Konseptual

antara PAD, DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Gambar 1.3 Kerangka Konseptual



Hipotesis

1. Hipotesis Pertama
PAD, DAU, DAK, DBH, ID berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara baik secara simultan dan parsial.
2. Hipotesis Kedua
Belanja Daerah dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID dengan Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian dilakukan pada Kabupatendan Kota di Provinsi Sumatera Utara dalam

kurunwaktu 2010-2014. Data dalam penelitian ini dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan APBD seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan data runtut waktu (*time series*) selama 4 (empat) tahun. Penelitian ini dilakukan secara sensus sehingga melibatkan seluruh objek penelitian yaitu 33 kabupaten/kota, sehingga jumlah data amatannya adalah sebanyak 132. Data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2001:61), data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna.

Tabel 1.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Variabel Dependen Pertumbuhan Ekonomi	Suatu ukuran angka-angka yang menggambarkan perkembangan perekonomian di suatu daerah pada satu tahun tertentu, yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya	PDRB harga konstan pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi pendapatan yang bersumber dari pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan yang berlaku	Realisasi PAD pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
Dana Alokasi Umum (DAU)	Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat umum yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya	Realisasi DAU pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional	Realisasi DAK pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
Dana Bagi Hasil (DBH)	Merupakan dana bagian daerah yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan sumber daya alam	Realisasi DBH pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
ID (ID)	Merupakan penanaman modal yang dananya berasal dari daerah itu sendiri	Realisasi ID pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio
Variabel Moderating Belanja Daerah	Semua pengeluaran pemerintah daerah dalam suatu periode anggaran	Realisasi pengeluaran pemerintah kab/kota Provinsi Sumatera Utara (2011-2014)	Rasio

Sumber: data diolah (2016)

Model Penelitian

Ada dua model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini:

1. Analisis Regresi Berganda, untuk menguji hipotesis pertama.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = r + S_1X_1 + S_2X_2 + S_3X_3 + S_4X_4 + S_5X_5 + e$$

Keterangan:

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
 - α = Konstanta
 - $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Variabel
 - X₁ = PAD
 - X₂ = DAU
 - X₃ = DAK
 - X₄ = DBH
 - X₅ = ID
 - e = Error
2. Uji Residual, untuk menjawab

hipotesis kedua.

$$M = r + S_1X_1 + S_2X_2 + S_3X_3 + S_4X_4 + S_5X_5 + e \quad e'' = r + S_1Y_1$$

Keterangan :

- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_5$ = Koefisien Variabel
- X₁ = PAD
- X₂ = DAU
- X₃ = DAK
- X₄ = DBH
- X₅ = ID
- M = Pemoderasi Belanja Daerah
- e = Error

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 1.2

Tabel 1.2 Hasil Deskripsi Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD_X1	132	2.76E6	1.52E9	8.0267E7	2.11809E8
DAU_X2	132	1.94E8	1.39E9	4.9043E8	2.46882E8
DAK_X3	132	1.78E7	1.05E8	4.8932E7	1.87692E7
DBH_X4	132	9.61E6	2.74E8	4.0804E7	4.11293E7
ID_X5	132	.00	1.83E8	9.7850E6	2.01490E7
BD_Z	132	2.57E8	4.37E9	7.9017E8	5.91323E8
PE_Y	132	5.38E5	1.17E8	1.1626E7	1.95310E7

Sumber : data diolah (2016)

Pengujian Hipotesis Pertama

1. Uji Parsial (Uji-t)

Hasil uji parsial (Uji-t) dapat dilihat pada tabel 1.3 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-4.889	1.180			-4.145	.000
PAD_X1	.062	.003	.676		20.247	.000
DAU_X2	.018	.003	.232		6.304	.000
DAK_X3	-.007	.026	-.006		-.253	.801
DBH_X4	.072	.017	.151		4.216	.000
ID_X5	-.010	.020	-.011		-.513	.609

a. Dependent Variable: PE_Y

Berdasarkan pengujian pada Tabel 3, maka secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

1. nilai sig untuk PAD, DAU, DBH adalah sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa PAD, DAU, DBH berpengaruh secara signifikan terhadap PE.
2. nilai sig untuk DAK dan ID adalah masing-masing sebesar 0.801 dan $0.609 > 0.05$, maka H_0

diterima yang berarti bahwa DAK dan ID berpengaruh secara tidak signifikan terhadap PE.

Model persamaan regresi di atas sebagai berikut :

$$Y = -4.889 + 0.062X_1 + 0.018X_2 - 0.007 X_3 + 0.072 X_4 - 0.010X_5$$

2. Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil statistik analisis secara simultan tercantum pada tabel 1.4

Tabel 1.4 Hasil Uji-F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.749E16	5	9.498E15	482.278	.000 ^a
	Residual	2.481E15	126	1.969E13		
	Total	4.997E16	131			

a. Predictors: (Constant), ID_X5, DAK_X3, PAD_X1, DBH_X4, DAU_X2

b. Dependent Variable: PE_Y

Sumber : data diolah (2016)

Hasil Uji F diatas menunjukkan bahwa nilai sig ($0.000 < 0.05$), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **H_0 ditolak**. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PAD, DAU, DAK, DBH dan ID berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap PE.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkat kekuatan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.950 artinya variabel independen (PAD, DAU, DAK, DBH dan ID) dapat menjelaskan variabel dependen (PE) sebesar 95% dan sisanya

sebesar 5% dijelaskan oleh variabel model penelitian ini. lain yang tidak dimasukkan dalam

Tabel 1.5 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.975 ^a	.950	.948	4.43779E6

a. Predictors: (Constant), ID_X5, DAK_X3, PAD_X1, DBH_X4, DAU_X2

Sumber : data diolah (2016)

Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linier

berganda dengan uji residual. Hasil persamaan uji residual dapat dilihat pada tabel 1.6.

Tabel 1.6 Hasil Analisis Uji Residual Variabel Pemoderasi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.300	3.790		8.706	.000
	PE_Y	1.168	.167	.522	6.985	.000

a. Dependent Variable: AbsRes_1

Sumber : data diolah (2016)

Berdasarkan tabel di atas persamaan residual model uji residual sebagai berikut: " e " = **3.300 + 1.168Y**

Hasil uji residual diatas menunjukkan bahwa nilai variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai sig sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai koefisien parameternya bernilai positif sebesar 1.168. Suatu variabel dapat memoderasi jika nilai

signifikannya adalah lebih kecil dari 0.05 (Ghozali, 2006). Dari uji residual ini diperoleh kesimpulan bahwa Variabel Belanja Daerah (BD) merupakan variabel moderasi yang dapat memperkuat hubungan antara PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain H_0 diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan

- a. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, variabel DAK dan ID berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi,
- b. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Belanja dapat memoderasi hubungan antara PAD, DAU, DAK, DBH, dan ID terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Keterbatasan

- a. keterbatasan dalam periode penelitian (4 tahun), yaitu periode 2011-2014 sehingga tidak dapat memberikan kesimpulan yang lebih akurat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi.
- b. keterbatasan dalam hal adanya perubahan peraturan keuangan daerah sehingga alat ukur masing-masing variabel berubah, namun

tidak diperhitungkan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra .2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara.2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Sumatera Utara*. BPS : Medan
- Bati. 2009. “ Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Daulay, Rizkia. 2011. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Utara”. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*.

- Jakarta: PT Pustaka LP3ES
Indonesia
- Erlina, Zainul Bahri Torong dan Yois Nelsari Malau. 2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Moderating pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara". Dalam JABI Vol.2 No.2. Medan : halaman 1-8
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS Edisi Keempat*. Semarang: Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. Yogyakarta: KOMPAK
- Hamzah, Ardi. 2009. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Publik terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur. (Studi Pada 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2001-2006)". Jurnal: Balitbang Depdagri
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo.2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*.Yogyakarta:BP FE Universitas Gajah Mada
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Ekonomi Pembangunan-Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: YKPN
- Lubis, Ade Fatma. 2015. *Metode Penelitian Akuntansi dan Format Penulisan Tesis*. Medan : USU Press
- Nugraeni,2011. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)". AKMENIKA UPY Vol.8.Yogyakarta
- Nugroho,B.A. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan*

- SPSS.Semarang:Penerbit
ANDI
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 tahun 2011
tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
91/PMK.06/2007 tentang
Bagan Akun Standar
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor
52 tahun 2012 tentang ID
- Peraturan Pemerintah Nomor 104
tahun 2004 tentang Dana
Perimbangan
- Peraturan Pemerintah Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah
- Rizky Fitrianti, Ismi dan Suryo
Pratolo.2009. "Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah dan
Belanja Pembangunan
terhadap Rasio Kemandirian
dan Pertumbuhan Ekonomi
(Studi pada kota, Kabupaten
dan Provinsi di DIY)".
Dalam Jurnal Balitbang
Depdagri
- Saragih. 2005. *Desentralisasi Fiskal
dan Keuangan Daerah*
- Dalam Otonomi.* Jakarta:
Penerbit Ghalia Indonesia
- Samuelson, Paul dan William D.
Nordhaus .2011. *Ekonomi
Mikro.*Jakarta:PT. Media
Global Edukasi
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo
Hari. 2007. "Peta
Kemampuan Keuangan
Daerah Sesudah Otonomi
Daerah: Apakah Mengalami
Pergeseran? (Studi Pada
Kabupaten dan Kota se
Jawa-Bali)." Dalam
Simposium Nasional
Akuntansi X
- Setiyawati, Anis dan Hamzah, Ardi.
2007. "Analisa PAD, DAU,
DAK, dan Belanja
Pembangunan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi,
Kemiskinan, dan
Pengangguran". The 1st
Accounting Conference.
Jakarta
- Simanjuntak, Daslan. 2007. *Analisis
Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di
Kabupaten Labuhan Batu.
Tesis Tidak Dipublikasi,*

- Magister Ekonomi
Pembangunan USU. Medan
- Sitepu, Sri Wangi. 2009. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Tesis Tidak Dipublikasi, Magister Akuntansi USU.* Medan
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung : ALFABETA
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Adi, Priyo Hari. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi.* Surabaya : Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama
- Todaro, M.P. 2000. *Pembangunan Ekonomi* 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Wahyuni dan Priyo Hadi Adi. 2009. "Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bahi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabuapten/Kota SE Jawa-Bali)". *National Conference UKWMS* Surabaya